

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal akan keberadaan jumlah pulaunya, keberadaan jumlah pulau di Indonesia yang berkisar 17.000¹ membuat Indonesia menjadi beraneka ragam. Namun, keberadaan jumlah pulau yang cukup banyak di Indonesia juga membuat didalamnya terdapat kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini disebabkan ketidak samarataan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berimbas pada perekonomian.²

Dalam masalah perbaikan di sektor ekonomi, Kementerian Pariwisata Indonesia yang sebelumnya bernama Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, saat ini sudah mulai ambil bagian. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat mengangkat perkembangan ekonomi. Keadaan ini tentunya disebabkan atas keinginan suatu daerah mengalami peningkatan daya saing destinasi, agar menjadi daerah yang memiliki destinasi wisata yang sukses dan menarik. Dalam proses pembangunan suatu daerah, pemerintah memiliki kebutuhan yang tidak sedikit, pengeluaran yang terjadi misalnya seperti pengeluaran untuk sumber daya manusia, sumber daya alam, barang dan jasa, atau pengeluaran untuk kebutuhan operasional lainnya.

Dalam upaya membiayai pengeluaran tersebut, negara juga perlu mendapatkan pemasukan. Salah satu sumber pendapatan negara dapat melalui dari adanya sumber daya alam yang beragam yang dikelola dan menghasilkan. Dari beberapa sektor seperti pertanian, perikanan dan pertambangan yang memberi pemasukan pada negara, industri pariwisata juga dapat menjadi salah satu aspek yang memberi pemasukan negara.

Akan tetapi, dibutuhkan suatu pariwisata yang memiliki pemasaran yang profesional,

¹James F. McDivitt, [Asvi Warman Adam](#), [John David Legge](#), [Oliver W.Wolters](#), [Thomas R. Leinbach](#), [Goenawan Susatyo Mohamad](#) ,” Republic of Indonesia, Republik Indonesia”, Britanica, 20 Februari 2019, <https://www.britannica.com/place/Indonesia>, diakses 23 Februari 2019

² *Ibid*

kualitas layanan yang tinggi, produk yang kompetitif serta infrastruktur yang memadai. Namun, hal ini sering tidak tersedia di daerah terpencil, selain itu penganggaran dana untuk pembangunan sendiri membutuhkan banyak pengeluaran. Beberapa daerah juga akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dalam meningkatkan pendidikan atau pelatihan dalam industri pariwisata demi mencapai keuntungan yang lebih besar.

Interaksi dalam kegiatan hubungan internasional melibatkan beberapa aktor, diantaranya ada *International Non-Government Organization (INGO)*, pemerintah, dan individu. Proses berjalannya interaksi dalam industri kepariwisataan terjadi sebagaimana pemerintah daerah ikut memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan sektor pariwisata. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran melalui pengelolaan sumber daya alam yang tentunya perlu dikelola dengan baik, sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, perijinan dari pemerintah daerah dalam hal kerjasama yang diminta oleh *International Non-Government Organization (INGO)* ataupun *Multinational Corporation (MNC)*.

Sebab aktor lain dapat membantu peran perencanaan pembangunan daerah dalam membangun pariwisata di daerah tersebut, serta perlunya perencanaan pariwisata, hal ini bertujuan untuk memastikan lingkungan yang dikelola industri pariwisata dengan memperhitungkan konteks lokal, pemerintah dapat secara tepat membuat rencana pengembangan destinasi yang berkelanjutan dengan perkiraan mengenai daya dukung atau dampak sosial yang diperhitungkan ketika mengembangkan rencana induk pariwisata.

Hal ini harus dilakukan karena seringkali, terutama pada destinasi kecil, otoritas pariwisata tidak memiliki pengetahuan tentang perencanaan pariwisata serta sumber daya untuk mendapatkan keahlian yang dibutuhkan.³ Oleh karena itu keberadaan konsulat lokal dan konsulat asing dibutuhkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam membantu menyelesaikan

³ H. Hermawan, Erlangga Brahmanto, "GEOWISATA Perencanaan Pariwisata Berbasis Konservasi", NEM, Bandung 2017, P.03

masalah ketertinggalan disektor pariwisata. Pariwisata dapat menimbulkan interaksi dengan budaya dan masyarakat lokal, hal tersebut menjadi penting bagi wisatawan, serta dapat mendorong minat yang lebih besar dan mendorong masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan tradisi. Pariwisata adalah industri jasa yang padat karya dengan potensi yang besar untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis baru. Penduduk lokal dapat menuai manfaat ekonomi jika aktif terlibat.

Dalam hal meningkatkan pembangunan kualitas pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menjalin kerja sama dengan *International Non-Government Organization (INGO)* dalam hal ini SwissContact. SwissContact adalah sebuah lembaga non pemerintahan/nirlaba. Di Indonesia, SwissContact mengimplementasikan beberapa program pengembangan dan peningkatan taraf hidup serta perekonomian masyarakat, salah satunya adalah program WISATA.⁴ Program ini merupakan program kerjasama antar wilayah di Indonesia yang memiliki ketertinggalan pada sektor pariwisata dengan SwissContact . Program WISATA diimplementasikan di 4 destinasi, salah satunya adalah Destinasi Tanjung Putting yang berada di wilayah Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah, dan untuk memastikan bahwa program WISATA bisa terjaga keberlanjutannya, maka SwissContact harus bermitra dengan pemerintah daerah setempat, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat perencanaan dan pembangunan di setiap sektor khususnya pariwisata. Selain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SwissContact juga bermitra dengan Dinas Pariwisata. Secara singkat, mungkin bisa dijelaskan bahwa dengan Badan Perencanaan

⁴ *SwissContact*, WISATA II Pengembangan Pariwisata Untuk Destinasi Terpilih di Indonesia, *SwissContact*, Bali, 2014, P. 08-14

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SwissContact bekerjasama untuk membuat perencanaan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan, sementara dengan Dinas Pariwisata, SwissContact bekerjasama untuk hal-hal teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor tersebut, contoh. pelatihan, peningkatan kapasitas, dan inovasi baru.

Alasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah mempercayai kinerja SwissContact karena pada tahun 2009 sampai September 2013 SwissContact telah melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata Flores berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Flores sebagai daerah destinasi yang sukses dan menarik.⁵

Serta SwissContact mengajukan pembiayaan dana dalam pengembangan wisata akan dibebankan pada SwissContact, hal tersebut mampu menjadi pertimbangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam menyetujui tawaran yang diajukan oleh SwissContact dengan argumen meminimalisir adanya dana pengeluaran. SwissContact sendiri mendapat keuntungan dalam hal edukasi, penelitian dan menjalankan suatu programnya.

Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah memiliki sebuah destinasi pariwisata yang menjadi sorotan bagi wisatawan. Salah satunya adalah wisata Tanjung Puting, Pada tahun 2015 Tanjung Puting masuk pada daftar *Destination Management Organization (DMO)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata. Kawasan Tanjung Puting yang berada di Kalimantan Tengah merupakan satu di antara 15 destinasi pariwisata di seluruh tanah air yang terpilih sebagai destinasi yang akan dikembangkan melalui program *Destination Management*

⁵SwissContact, WISATA II Pengembangan Pariwisata Untuk Destinasi Terpilih di Indonesia, SwissContact, Bali, 2014, P. 08-14

Organization (DMO) untuk lima tahun ke depan.⁶

Kementerian Budaya dan Pariwisata memfasilitasi para organisasi internasional untuk mengawali proses penilaian dan kajian-kajian, kemudian dilanjutkan dengan menyatukan kepentingan dalam perencanaan pengembangan wisata Tanjung Puting, hingga nantinya menjadi destinasi yang mandiri dan berdaya saing global.⁷ Oleh sebab itu berdasarkan noktah kesepahaman (*MoU*) antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan SwissContact, ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam pemilihan destinasi yang akan didukung oleh SwissContact, salah satunya adalah destinasi tersebut masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan dukungan dalam pengembangannya. Destinasi Tanjung Puting termasuk sebagai salah satu destinasi tersebut. Selain itu ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan antara lain komitmen pihak SwissContact untuk bekerjasama, lokasi yang dapat dikembangkan, dan tentunya dukungan dari para pelaku pariwisata setempat.⁸

Pada wilayah daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang memiliki industri wisata yang cukup memiliki potensi sebagai penunjang ekonomi yang tinggi membuat keputusan untuk menjalin kerjasama dengan *International Non-Government Organization (INGO)* dalam hal ini SwissContact yang memiliki fokus pada industri wisata, hal tersebut diharapkan dapat memaksimalkan sektor pariwisata untuk dibuka dalam jangkauan yang lebih luas, dalam artian ditujukan untuk menarik wisatawan, dan tentu membutuhkan diskursus yang amat mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk didalamnya masyarakat wilayah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Ketika dapat memaksimalkan potensi-potensi di sektor pariwisata yang produktif, jika

⁶Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kowaringin Barat, Rencana Kegiatan Tahunan *Regional Tourism Development in Selected Destination*, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, 2018, P. 05

⁷*Ibid*

⁸ *SwissContact*, Project Tourism Development for Selected Destination in Indonesia, <https://www.SwissContact.org/nc/en/country/indonesia/projects/projects-indonesia/project/-/show/tourism-development-for-selected-destinations-in-indonesia.html>, Diakses 23 Februari 2019

dikelola dengan baik maka mudah untuk dapat memberikan keuntungan mengisi pendapatan pemerintah daerah dan pusat, dan tentu keuntungan juga untuk masyarakat serta alam sekitar. Hal ini dapat berupa akses yang memadai serta peremajaan kualitas lingkungan hidup di tempat tersebut. Namun masyarakat, pemerintah, serta *International Non-Government Organization (INGO)* yang bersangkutan harus tidak menutup mata terhadap destruksi aspek lingkungan, sosial, budaya serta aspek lain yang dihadirkan kemudian. Seringkali sektor pariwisata yang menarik dapat dan berfokus pada mengejar keuntungan keuangan dan menimbulkan banyak minat pengunjung, yang terkadang tidak semua pengunjung memiliki kesadaran dalam menjaga destinasi, dan seringkali menimbulkan kerusakan, dan justru menjadi ancaman terhadap keberlangsungan sektor pariwisata tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, bagaimana peran SwissContact dalam menangani pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan peran SwissContact dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun pada tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengurai jawaban dari pertanyaan yang telah peneliti rumuskan, yaitu perkembangan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun pasca adanya kerjasama pemerintah daerah dan SwissContact.

Manfaat pada bidang kajian Hubungan Internasional, memberikan kontribusi terhadap studi

tentang peranan SwissContact dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun serta diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun berharap membuka jalan terhadap penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk memenuhi gelar Strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1. Peran *International Non-Governmental Organization (INGO)*

*“International non-governmental Organizations (INGOs) are not-for-profit voluntary associations operating at the international, transnational. Or global level. With members participants from many countries.”*⁹ *“They bring together like-minded individual or association of individuals to conduct a wide variety of activities across virtually all social domains.”*¹⁰

INGO merupakan asosiasi sukarela nirlaba yang beroperasi di tingkat internasional, transnasional atau global dengan anggota dari berbagai negara. Fokus aktivitas yang dimiliki INGO merupakan kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial. Menurut Suiner, INGO bisa disebut sebagai kelompok-kelompok yang mampu menciptakan hubungan saling ketergantungan dan interaksi yang lebih baik antar pemerintah dan masyarakat dalam lingkup internasional. INGO disebut sebagai globalisasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi melalui hubungan tersebut.

*“In being “not governmental” they constitute vehicles for people to participate in development and social changes in ways that would not be possible through government programmes. In being “not governmental” they constitute a “space” in which it is possible to think about development and social change in ways that would not be likely through government programmes”.*¹¹

INGO memberikan tempat dan kesempatan bagi individu atau entitas bukan negara untuk ikut andil dalam proses perkembangan dan perubahan sosial yang tidak bisa dilakukan oleh entitas negara.

⁹ International NonGovernmental Organization (Online) <http://what-when-how.com/socialsciens/international-nongovernmental-organizations-ingos-social-science/> diakses pada 28 Maret 2020

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Lewis, David. 2009. *Nongovernmental Organization, Definition and History*. (PDF) *London School of Economic and political Science*.

Pada dasarnya, *INGO* dan *NGO* tidak memiliki banyak perbedaan dalam peran maupun kegiatan yang dilaksanakan. Yang menjadi perbedaan hanyalah terkait *scope* dalam keanggotaannya.¹² Cousins William, dalam *Non-Governmental Initiatives*, menjelaskan bahwa suatu organisasi non pemerintah memiliki peran sebagai penyedia infrastruktur bagi masyarakat yang membutuhkan.¹³ Hal ini terkait dengan fasilitas-fasilitas yang tidak mampu didapatkan oleh masyarakat itu sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Selain sebagai penyedia infrastruktur, mengatasi suatu masalah melalui pengadaan program juga merupakan peran yang penting untuk dilaksanakan. Tidak hanya dalam pembuatan program dan kegiatan baru, William menjelaskan bahwa dukungan juga terkait program yang sudah ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Selain dua peran tersebut, suatu organisasi juga mampu berperan sebagai pihak yang mengembangkan kapasitas bantuan teknis dan memberikan pelatihan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan.¹⁴

Menurut Lewis *INGO* diklasifikasikan kedalam dua tipe berdasarkan kegiatan dan tujuan. Tipe pertama adalah *INGO* yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, contohnya *OXFAM*. Tipe kedua adalah *INGO* yang bergerak secara khusus untuk advokasi kebijakan yang menuai kampanye publik untuk mengeja perubahan sosial contohnya *WWF*. Dalam pemerintah negara Fuji *WWF* memiliki pengaruh untuk pelestarian terhadap ikan di laut.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan *INGO* dapat berupa kegiatan yang sepenuhnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui bantuan-bantuan secara gratis atau

¹² Saunier, Pierre. 2009. "*International Non-Governmental Organizations*." The Palgrave Dictionary of Transnational History : Palgrave Macmillan. pdf

¹³ William, Cousins. 1999. "*Roles of INGO*" (Online) <https://www.gdrc.org/ngo/ngo-roles.html> diakses pada 28 Maret 2020

¹⁴ *Ibid*

biasa disebut dengan istilah Filantropi.¹⁵ Bantuan tersebut condong terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan. Istilah ini pertama kali muncul saat organisasi-organisasi amal di Amerika Serikat memiliki fokus terhadap komunitas-komunitas lokal untuk mampu melaksanakan perubahan dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Kegiatan amal tersebut meluas hingga berbagai negara di dunia dan menjadikan kegiatan amal sebagai salah satu aktivitas global.

Berbagai negara mulai menerapkan kegiatan amal tersebut, termasuk adanya peran pemerintah dalam membantu menyediakan pelayanan bagi organisasi-organisasi amal untuk kebutuhan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan amal yang dilaksanakan oleh organisasi terkait. *“Community based organizations and cooperatives can acquire, subdivide and develop land, construct housing, provide infrastructure and operate and maintain infrastructure such as well or public toilets and solid waste collection services. They can also develop building material supply centres and other community-based economic enterprises. In many cases, they will need technical assistance or advice from governments agencies or higher level NGO’s.”*¹⁶

Keberadaan aktor selain negara juga memiliki bagian untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi disuatu negara. Tentunya pariwisata menjadi salah satu sektor yang menyumbang perekonomian.

1.5.2 Filantropi

*“Philanthropy is an idea, event, or action that is done to better humanity and usually involves some sacrifice as opposed to being done for a profit motive. Private philanthropy is remaking the landscape of international development assistance.”*¹⁷ Menurut Carol, filantropi merupakan bentuk dari adanya bantuan dalam lingkup pembangunan internasional melalui inovasi

¹⁵ Michael Worth. 2010. *“Fundraising: Principles and Practice”* Washington : Sage Publications

¹⁶ William, Cousins. 1999. *“Roles of INGO”* (Online) <https://www.gdrc.org/ngo/ngo-roles.html> diakses pada 20 April 2020

¹⁷ Adelman, Carol. 2009. *“Global Philanthropy and Remittances : Reinventing Foreign Aid.”* Hlm.23 pdf.

yang lebih baru.¹⁸ Carol berpendapat bahwa filantropi merupakan model baru dari konsep bantuan luar negeri. Filantropi lebih menekankan pada jenis bantuan “donor-to-recipient” sehingga melibatkan partisipasi langsung dari pendonor.¹⁹ *The role of philanthropy as a form of social control, a source of social power, and a forerunner of the modern welfare state.*²⁰ Robert Payton mendefinisikan filantropi sebagai tindakan yang berkaitan dengan sebuah metode organisasi dalam melaksanakan tindakan sukarela demi kepentingan umum.²¹

Gambar1.1 Theory of Philanthropy

| Theory of Philanthropy | |
|-------------------------|--|
| 1. Focus | Hypothesizes how a specific foundation contributes to change. |
| 2. Specificity | Foundation specific: Specifies how and why a specific foundation directs its resources to support specific changes. |
| 3. Basis | Based on donor intent, mission, vision, values, and priorities as determined by stewards of the foundation's assets and analysis of external environment and context. |
| 4. Evaluation questions | To what extent and in what ways is the foundation fulfilling its mission? To what extent are its mission, values, strategies, staffing, grantmaking procedures, grantee relationships, operating procedures, governance, investment approach, and organizational structures and processes aligned to contribute to the change it supports? How can impact be enhanced? |
| 5. Utility | Increases a foundation's effectiveness, self-knowledge ("makes the invisible visible"), coherence, and transparency externally; generates learning and capacity for future impact and adaptation to change. |

Sumber : Patton, Michael Quinn; Foote, Nathani; and Radner, James. “A Foundation's Theory of Philanthropy : What It Is, What It Provides, How to Do it.”

Menurut teori filantropi, sebuah organisasi memiliki fokus utama yakni berkontribusi untuk sebuah perubahan yang lebih baik melalui suatu tindakan yakni mengarahkan sumber dayanya

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Green. Abigail. 2005. “Rethinking Sir Moses Montefiore: Religion, Nationhood, and International Philanthropy in the Nineteenth Century.” pdf

²¹ Payton. Robert. 1986. “Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good. Pdf

untuk mendukung suatu perubahan tersebut. Tujuan utama yang dimiliki oleh sebuah organisasi menurut teori filantropi adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumbangan atau donor, dan berkaitan dengan visi misi sebuah organisasi tersebut. Teori filantropi juga dirancang untuk membantu sebuah organisasi menyelaraskan strategi, tata kelola serta prosedur kebijakan dengan sumber daya dan visi sebuah organisasi.²²

Teori filantropi juga menjelaskan bagaimana proses suatu organisasi dalam mencapai sebuah misinya melalui strategi kegiatan yang dilaksanakan maupun pemberian bantuan hingga proses yang sesuai untuk suatu perubahan yang ingin dicapai.²³ Filantropi dipandang sebagai tindakan individu yang menyumbangkan sejumlah besar uang untuk tujuan sosial yang bermanfaat. Namun, seiring berkembangnya jaman, filantropi tidak hanya terkait dengan pemberian individu, namun juga kelompok.²⁴ Dalam hal sumbangan yang diberikan juga mengalami perluasan makna yakni tidak hanya berupa uang, melainkan pemberian barang, keterampilan, layanan dan waktu.²⁵

Keberadaan suatu kelompok dalam hal ini SwissContact dalam membantu proses pembiayaan untuk operasional pengembangan pariwisata sangat diperlukan, dikarenakan kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pengembangan pariwisata. "A foundation funded a major advocacy campaign when a political window of opportunity opened. Acting quickly would be critical".²⁶ Pendanaan menjadi salah satu hal yang penting agar suatu rencana dapat berjalan.

1.6 Sintesa Pemikiran

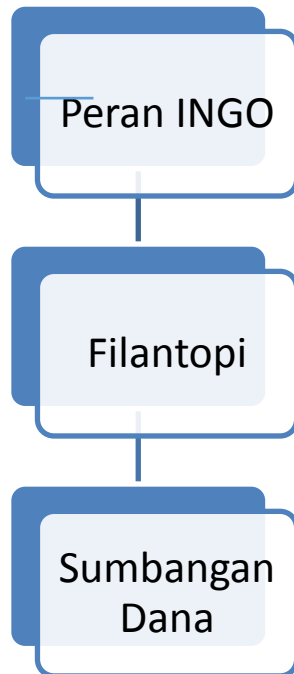
²² Patton, Michael Quinn; Foote, Nathani; and Radner, James. "A Foundation's Theory of Philanthropy: What It Is, What It Provides, How to Do it." The Foundation's Review: Vol 7 ; Article 4 pdf. 2015.

²³ Ibid

²⁴ Plewes, Betty. 2008. "Global Philanthropy and International Cooperation : A Guide to Trends and Issues". Pdf hlm 5

²⁵ Ibid

²⁶ Patton, Michael Quinn; Foote, Nathani; and Radner, James. "A Foundation's Theory of Philanthropy: What It Is, What It Provides, How to Do it." The Foundation's Review: Vol 7 ; Article 4 pdf. 2015.



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran

Dari pemaparan teori di atas, sintesa pemikiran yang penulis dapat paparkan adalah adanya kebebasan yang dimiliki setiap individu termasuk dalam kebebasan menjalin kerjasama dengan siapa saja, maka peran suatu organisasi dalam menciptakan sebuah kesejahteraan memiliki kendali selain wewenang penuh dari pemerintah. Salah satu peran organisasi untuk mewujudkan kesejahteraan ialah dengan melaksanakan bantuan yang diberikan terhadap suatu masyarakat yang membutuhkan. Peran INGO sendiri memberikan bantuan untuk proses berkembangnya sektor yang tertinggal pada suatu wilayah, dalam hal ini salah satunya ialah dalam aspek pariwisata yang perlu dikembangkan, *INGO* juga berperan sebagai aktor yang melaksanakan program-program terkait permasalahan dalam kelompok masyarakat dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kategori bantuan-bantuan yang berasal dari *INGO* salah satunya dapat bersifat sukarela dan sepenuhnya fokus terhadap kesejahteraan manusia melalui bantuan-bantuan kemanusiaan, atau biasa disebut dengan istilah “Filantropi”. Filantropi mendukung adanya aksi sebuah *INGO*

melaksanakan perubahan melalui kegiatan yang berdampak bagi masyarakat, seperti adanya sumbangan dana untuk memenuhi oprasional yang berlangsung sesuai kebutuhan, serta keberadaan sukarelawan diberikan guna membantu memecahkan masalah yang ada dengan cara membuat perencanaan pengembangan. Sesuai dengan pemahaman filantropi terkait dengan penelitian ini, maka peran SwissContact sebagai suatu *INGO* ialah sebagai organisasi yang melaksanakan aksi dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk pelaksanaan pengembangan pariwisata dengan memberikan sumbangan dana untuk oprasional pengembangan pariwisata.

1.7 Argumen Utama

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka peran SwissContact dalam menangani pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun tahun 2014-2018 ialah sebagai *INGO* yang memberikan bantuan berupa pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata secara langsung di Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Keberadaan kerjasama *INGO* dengan pemerintah setempat dikarenakan adanya pendekatan dengan entitas non-negara yang coba dilakukan oleh pemerintah setempat yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kotawaringin Barat. SwissContact dalam perannya memberikan bantuan yang bersifat sukarela yakni berupa sumbangan dana untuk berjalannya pelaksanaan pengembangan wisata.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Menurut Eko Budiono, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan secara murni untuk mengadakan deskripsi tanpa dilakukan analisis yang mendalam.²⁷ Sedangkan menurut Sudarwan, penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual,

²⁷ Budiarto, Eko. 2004. "Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah Pengantar." Jakarta EGC hlm. 28

situasi atau kelompok tertentu.²⁸ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskriptif atau uraian semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antar variabel maupun menguji hipotesis.²⁹

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan ruang yang digunakan dalam penelitian ini terjalin kerjasama diantara pihak SwissContact dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin barat yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sedangkan jangkauan waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama empat tahun, yakni 2014-2018. Kerjasama antara SwissContact dengan pemerintah BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2018.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Sumber utama dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan isu hubungan internasional yang diteliti dalam penelitian ini dan beberapa data lain merupakan data primer yakni dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan yakni perwakilan pihak SwissContact dan Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat-provinsi Kalimantan Tengah.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini ialah deskriptif-kualitatif. Menurut Convello, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan melukiskan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

²⁸ Danim, Sudarwan. 2003. "Riset Keperawatan: Sejarah dan Metodologi." Jakarta : EGC hlm 52

²⁹ *Ibid* hlm 53

fakta-fakta atau fenomena yang sedang diselidiki.³⁰ Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada.³¹ Sedangkan menurut Moh. Nazir metode deskriptif kualitatif ialah suatu metode dalam meneliti yang memusatkan perhatian pada masalah–masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif.³²

1.8.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, bab satu menjelaskan mengenai kerangka penelitian yang sistematis yang dihadirkan sebagai landasan dalam penelitian yang akan digunakan di bab-bab selanjutnya BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi paparan serta hal yang mendasari penelitian ini serta garis besar mengenai penelitian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, penarikan dugaan sementara, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tertaut pada bagian pertama dalam penelitian ini.

Bab II akan memaparkan latar belakang swisscontact serta tujuan kerjasama, sasaran kerjasama, hasil yang diharapkan oleh pemerintah setempat dengan SwissContact dalam melakukan pengembangan wisata, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak SwissContact dengan mengirimkan tenaga ahli atau sukarelawan, dalam melakukan pengembangan wisata.

Bab III akan memaparkan peran filantropi dalam upaya berupa sumbangan dana, yang akan dilakukan oleh pihak SwissContact dalam melakukan pengembangan wisata.

Bab IV menjadi bab terakhir pada penelitian ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan hasil dari analisis peneliti terhadap studi kasus yang diteliti guna menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan.

³⁰ Mardalis, 1999. “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal” (Online) <http://digilib.uinsby.ac.id/7354/3/bab%203.pdf>. Diakses pada 07 Oktober 2019

³¹ *Ibid*

³² Objek dan metode penelitian (Online) <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-iraquraisy-26896-4-unikom-i-i.pdf>. Diakses pada 07 Oktober 2019